

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. PETUGAS PERSIDANGAN

Desk : Desk Kewilayahan 2
 Provinsi : Sulawesi Tenggara
 Pimpinan Sidang 1 : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
 Pimpinan Sidang 2 : Direktur Transportasi (Diwakili oleh Bapak Adi Perdana)
 Notulis Aplikasi : Luna Perita
 Notulis Offline: Reynaldi Bagas Andrian
 Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Kementerian ATR/BPN	1. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
2. Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas	2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2. Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara	3. Kementerian Kelautan dan Perikanan	3. Direktorat Transportasi
4. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara	4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4. Direktorat Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara	5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
6. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara	6. Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	6. Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara	7. Kementerian Perhubungan	
8. Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
9. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	14 - Orientasi Pencegahan dan Penanggulangan anemia remaja putri bagi puskesmas dan guru UKS	14	17	Kab/kota		Kementerian Kesehatan	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		01 - Kesehatan untuk Semua			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		-	-	-	-				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Dinas Kesehatan - Rencana kegiatan: yang sudah dilakukan baru 4 kabupaten dan banyak puskesmas - Tingkat stunting sudah mulai naik, perlu pencegahan kelahiran bayi stunting - Kegiatannya di provinsi (pelatihan)		Kementerian Kesehatan - Selaras dengan yang disampaikan KGM, hal ini diakomodir melalui DAK, secara kesimpulan bisa ditolak. - Melalui BOK Puskesmas - Saat ini sedang dilakukan bilateral meeting		Direktorat KGM - Ditolak untuk dialihkam menjadi mekanisme pembiayaan DAK Non Fisik - Lokusnya ada 13 kabupaten lagi, utk kedepannya bisa disampaikan juga lokusnya sehingga bisa selaras. Bisa disampaikan juga ke kementerian kesehatan Catatan Pimsid			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

				- KGM, Reg2, Kemenkes: Perlu mengakomodir kebutuhan yang diusulkan (jadi catatan bersama)	
--	--	--	--	---	--

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
2	18 - Percepatan penanganan stunting ,Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pengembangan unit layanan Kesehatan Ibu dan Anak)	18	1	Unit		Kementerian Kesehatan	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		01 - Kesehatan untuk Semua			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		-	-	-	-				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Dinas Kesehatan - Rehabilitasi ruangx untuk penanganan - DED -> ruangnya berubah menjadi ruangan		Kementerian Kesehatan - Dapat Direkomendasi melalui DAK Fisik - Perlu kejelasan KIA ataupun layanan rujukan		Pimsid - Ditolak, untuk diusulkan melalui DAK. Perlu mempersiapkan RC, merenovasi ruangan yang sudah ada. - Dit KGM, Reg 2, perlu diakomodir dalam kebijakan DAK.			



NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
3	22 - Pengadaan kendaraan dinas operasional pelayanan adminduk di kabupaten/kota	22	4	Unit		Kementerian Dalam Negeri	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		03 - Transformasi Tata Kelola		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		06 - Transformasi Digital			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemerintah Daerah - Disepakati		Kementerian Dalam Negeri: -		Direktorat KJS - Usulan ini kita tolak pak karena bisa diusulkan melalui DAK. Untuk usulan pengadaan kendaraan ini kemungkinan belum bisa diakomodir juga di DAK. - Saran kami usulan diperbaiki, untuk pengadaan alat cetak dan alat rekam ktp - Iya berupa moratorium, tapi tahun depan belum tau Catatan Pimsid			



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

				- Ditolak, Karena merupakan kebijakan nasional (moratorium nasional)	
--	--	--	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
4	20 - Pemenuhan Tenaga Medis Dokter Spesialis & Dokter Sub Spesialis	20	10	Orang		Kementerian Kesehatan	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 – Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		01 – Kesehatan Untuk Semua			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		<i>Diakomodir sesuai catatan Rakortek</i>		<i>Diakomodir sesuai catatan Rakortek</i>		<i>Diakomodir sesuai catatan Rakortek</i>			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
5	21 - Kebutuhan tenaga Medis Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak	21	20	Orang		Kementerian Kesehatan	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 – Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		01 – Kesehatan Untuk Semua			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		<i>Diakomodir sesuai catatan Rakortek</i>		<i>Diakomodir sesuai catatan Rakortek</i>		<i>Diakomodir sesuai catatan Rakortek</i>			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
6	33 - Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi/SMK Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Dunia Industri (Program Upskilling dan Reskilling Guru SMK)	33	500	Guru		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 – Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemerintah Daerah - Disepakati		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: - Tidak bisa memastikan targetnya sebesar itu.		Direktorat APK - Konfirm, dapat diakomodir namun perlu menyesuaikan targetnya			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
7	19 - Penanganan Kawasan Kumuh Konawe (Kawasan Mopu)	19	79,37	Hektar		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Kadis Permukiman - Berada di dekat KI Morosi, ini sangat dibutuhkan masyarakat utk meningkatkan kualitas hidup - 3 Lokasi ini seluas 79 hektar, dengan masing masing kawasan diatas 15 hektar. - Peta yang ditampilkan keliru, luas keseluruhan itu 79,37.		Ditjen Cipta Karya - Sudah dibahas dalam rapat kongreg dan disepakati untuk tahun 2025 - Terkait dengan luasan, perlu dikonfirmasi apakah di 3 area ini maksudnya 79 hektar semua atau salah satunya? - Sebaiknya di mergin, biar menyesuaikan kewenangan. - Penanganan tidak bisa langsung dilaksanakan secara keseluruhan.		Direktorat Perkim - Usual ini sudah dialokasikan di tahun 2025. Kami juga ingin sosialisasi ke masyarakat. - Ini merupakan APBN, sudah ada usulan dari cipta karya - Bisa untuk updating kawasan kumuh, bisa update SK Pimsid - Polygon dijadikan satu saja - Luas Polygon perlu di cek kembali di SK Kumuh			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

				<ul style="list-style-type: none">- Kalau semisal seperti itu, bisa jadi ada 2 sumber pembiayaan. Ada yang APBN ataupun DAK- Kesimpulan diakomodir, ttapi perlu diperbaiki geotagging sesuai dengan jumlah/volume usulan (79,37)- Kalo lokasinya dikoreksi, apakah ada peraturan yang dilanggar?- Polygonnya harus ada 2 (kalau 2 lokasi), perlu diperbaiki.	
--	--	--	--	---	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
8	17 - Pembangunan PLTS Terpadu	17	1	Laporan		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		05 - Penerapan Ekonomi Hijau			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		-	-	-	-				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Sekda Dinas ESDM - Ada 3 lokasi, tapi dalam 1 kegiatan. 1) Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Kaledupa, desa Ambeua; 2) Kabupaten Bombana, Kecamatan Kabaena, Kelurahan Sikeli; 3) Kabupaten Bombana, Kecamatan Kabaena Timur Desa Tolitoli - Targetnya 3 Unit - 1 Unit costnya 1.015.000 (1m 15 juta)		Kementerian ESDM - Memang di Renja kami sudah ada, namun untuk usulan di Kabupaten Wakatobi belum dapat kami akomodir karena keterbatasan anggaran dan diusulkan pada tahun 2025 dengan melengkapi RC - Dapat juga diajukan pada 2025 jika diajukam lelaui DAK - RC: Lokus Pembangunan berada di wilayah 3T, belum masuk jaringan PT PLN (5 tahun kedepan,		Direktorat SDEMP - Dalam Renja sudah ada,, namun memang lokasinya belum firm. - Kami perlu konfirmasi ke rekan-rekan ESDM, apakah lokasi ini - Pelaksanaan PLTS terpadu ini dikhususkan untuk daerah 3T - Anggaran sangat terbatas, PLTS terpadu anggarannya tidak terlalu besar. - Jika kedepannya ada tambahan, mungkin bisa didiskusikan kembali oleh Kementerian ESDM			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

		<p>Bappeda Sultra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kami sudah lengkapi dengan usulan, DED, lokasi itu memang 3T dan tidak dijangkau oleh PLN 	<p>melampirkan surat dari pln), menyampaikan surat usulan pembangunan dari PLTS terpusat, FS DED, Surat usulan pembangunan usulan dari Pemda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum menerima 2 persyaratan tersebut, di 2025 belum bisa terakomodir. - Kondisinya anggaran kita terbatas tahun ini, diusulkan untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan RC nya - Akan dilihat kembali lokasi-lokasi yang sesuai dengan prioritasnya dan memenuhi persyaratan 	<p>Pimsid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditolak dengan catatan diprioritaskan pada tahun 2026 dan dilengkapi. 	
--	--	---	---	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
9	16 - Pembangunan Kantor Balai Benih Utama (BBU) Padi Walambenowite	16	300	M2		Kementerian Pertanian	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Dinas Pertanian: - Untuk pembangunan kantor balai benih itu tidak ada cantolannya, kami ingin menyesuaikan menjed Gudang Benih - RO nya tidak ada - Telah konfirmasi ke kementerian pertanian untuk diajukan melalui DAK		Kementerian Pertanian - Usulan ini betul sesuai catatan, disarankan untuk diusulkan ke DAK karena tidak ada menunya di APBN		Direktorat Pangan Pertanian - Nomenklatur tersebut disarankan pengusulannya masuk ke DAK karena - Intinya setuju, diarahkan melalui DAK Pimsid: - Ditolak, diusulkan kembali karena merupakan DAK (diusulkan kembali pada forum DAK) - Dit. PP, Reg2, perlu memastikan usulan kegiatan ini dapat			



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

				tertampung di kebijakan DAK tahun 2025	
--	--	--	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
10	15 - Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK Yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Industri (DUDI)	15	12.000	Siswa		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemerintah Daerah - Disepakati		Kementerian Dikbudristek - Program ada, namun proposal based. Sekolah yang perlu mengusulkan dan kemudian diseleksi. Persyaratan perlu dilengkapi oleh sekolah baru kemudian sekolah tsb bisa dijadikan penerima - Secara nasional 85.000 siswa - Program ini SMK nya harus saling berkompetisi dengan SMK lainnya		Direktorat APK - Usulan ini, kami approve usulan ini dengan catatan perlu adanya penyesuaian dengan kesepakatan dengan kemdikbud.			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

			<ul style="list-style-type: none">- Syaratnya: SMK menjadi LSPP 1, Mempunyai guru yang sudah tersertifikasi asesor- Nanti ada aplikasinya dan semua bisa mengakses langsung.		
--	--	--	---	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	02 - Pembangunan Jembatan Muna-Buton	02	1	Unit		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketiimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-		-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Sultra <ul style="list-style-type: none"> - RC Lahan sudah dipersiapkan - Masih ada persoalan terkait - Rencananya di tahun 2030 Dinas PU <ul style="list-style-type: none"> - Setiap sisi sudah selesai - Area bebasnya belum selesai untuk peruntukan pariwisata 		Kementerian Bina Marga <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa hal yang belum siap - Telah dianggarkan di PUPR pada 2023 - Dependent checking belum selesai - Untuk finalisasi DED kita butuh wind tunner. - Perlu disiapkan, tidak di 2025 tapi antara di 2026-2027 didorong 		Pimsid: <ul style="list-style-type: none"> - Apakah akan selesai 1 tahun modeling dan DED nya? Dit Transport <ul style="list-style-type: none"> - Dalam RPJMN apakah ini masuk ke dalam prioritas? -> Tidak pak ini kami sedang dalam proses - Kemungkinan sangat kecil, kami mengusulkan ini masuk ke prioritas 2025-2029 			



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

			dengan mekanisme pembiayaan KPBU		
--	--	--	-------------------------------------	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
12	8 - Penanganan Kawasan Kumuh Kolaka (Dawi-Dawi dan Tonggoni)	08	35,35	Hektare		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketiimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemerintah Daerah A - Dari SK Bupati masuk kawasan kumuh, ada catatan ini menyangkut sosialisasi di 2 desa - Lokasinya berada di 2 desa. - Terkait baseline kumuh sudah.		Cipta Karya PUPR - Dari hasil pendataan SK Kumuh, ada beberapa dokumen yang belum lengkap (terkait dengan baseline kumuh dan deliniasi), sehingga belum bisa kami prioritaskan. Kami harapkan dokumen tsb perlu dilengkapi terlebih dahulu.		Direktorat Perkim - Dari longlist di Ditjen Ciptakarya belum ada, apakah RC nya belum siap? Pimsid - Baseline kumuh dan peta spasialnya perlu disempurnakan.			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
13	10 - Pembangunan Kolam Retensi Baruga	10	1	Kawasan		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemerintah Bappeda - Pihak BWS sudah bersurat ke pemprov sultra, tapi pemprov belum membalas (surat) - Sedang dalam proses pengukuran. Kadis Perumahan Sultra - Kami sudah memfasilitasi untuk mempersiapkannya, untuk apa yang BWS butuhkan. Pemerintah Bappeda		Kementerian PUPR - Proses pengadaan belum ada. - 2024 kami baru ada untuk anggaran operasionalnya saja, pengadaannya. - Pembangunan direncanakan tahun 2025 dengan biaya 50M - Belum ada alokasi anggaran untuk pengadaannya di tahun 2024 - Anggaran kami kesulitan		Direktorat SDA - Disepakati			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

		<ul style="list-style-type: none"> - Pihak BWS sudah bersurat ke pemprov sultra, tapi pemprov belum membalas (surat) - Sedang dalam proses pengukuran. 							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
14	11 - Optimalisasi SPAM IKK Labalawa	11	1	Paket		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		-	-		-			-	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Kadis Cipta Karya - Tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan kondisi PDAM yang dianggap masih kurang sehat manajemen, sehingga teman-teman dari kementerian		Cipta Karya - Memang di forum konreg tidak terbahas - Terkait RC ada satu dokumen, yaitu izin SIPA nya (penambahan 10 -> 20)		Pimisd - Harus ada data nya dulu, air bakunya berapa, spamnya berapa, butuhnya berapa - Perlu di matangkan dulu, sehingga ditolak. Diusulkan tahun depan shg perlu dibahas terlebih dahulu			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

		<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi yang dimaksud adalah peningkatan kapasitas (Air Baku dan SPAM) - Airnya bersumber dari sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah konfirmasi ke balai, bangunan intake itu merupakan aset pemda kota BauBau, sehingga usulan belum bisa diakomodir karena itu merupakan aset Pemda. 	<p>Direktorat Perkim Bappenas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait pembahasan di rakortek sebelumnya, satu masalahnya dibagian pengelolaan/manajemen - Pemda intinya itu menginginkan hal yang seperti apa, jika peningkatan 10 -> 20 lt/detik, apakah SIPA nya dapat memenuhi 20 lt detik? - Kami mengharapkan apa yang dibangun nantinya akan terintegrasi - Harus dipastikan juga air bakunya ada atau tidak, outputnya berupa apa. - Perlu tanggapan dari bws terkait kecukupan SIPA apakah yang eksisting sudah cukup atau belum. - Dalam longlist, tidak ada bentuk SPAM ini. Adanya dibagian SPAM Ikakanbolu dan IKK, intinya tidak ada SPAM Di bau bau 	
--	--	---	---	---	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
15	9 - Fasilitasi/Bantuan Sarpras Alat Ekonomi Produktif untuk KTH/KUPS	09	10	Paket		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ditolak	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO	RO			
		-	-	-	-			
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		Kadis - Untuk meningkatkan nilai tambah, kita membutuhkan sarpras untuk meningkatkan nilai tambah. - Berharap bisa ditindaklanjuti		Kementerian LHK: -		Direktorat KKSDA - Jadi terkait usulan, biasanya memang setiap tahun utk sumber pendanaannya melalui DAK. RO untuk pusat sebenarnya ada juga, tapi anggarannya sedikit. Rekomendasi dari kami diusulkan melalui DAK. - Menu di DAK Fisik sudah ada, namun sekarang sedang masa integrasi visi misi		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

				<ul style="list-style-type: none">- Semisal anggaran pusat, untuk lokusnya tidak ada di daerah sultra. <p>Pimsid</p> <ul style="list-style-type: none">- Ditolak- Diusulkan kembali melalui DAK- Dit KKSDA, Reg 2, dan Kementan perlu mengupayakan agar kebijakan DAK perlu ada medium bantuan sarpras ekonomi produktif.	
--	--	--	--	---	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kespakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
16	7 - Penanganan Kawasan Kumuh Kota Kendari (Puday - Nambo)	07	19,14	Hektare		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemda - Ini merupakan kewenangan pusat. - Semisal bermasalah dengan polygon, kam		Kementerian PUPR - Rekomendasi kami ditolak karena sudah digantikan dengan Puday Poasia		Pimsid: - Kalau bisa polygonnya dijadikan satu aja, kalau pisah pisah gt nanti jadi gak 15 hektar - Ditolak dan diganti menjadi Puday Poasia yang RC nya sudah siap Direktorat Perkim - Untuk usulan ini sudah pernah ada Puday, apakah sama dengan usulan ini?			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kespakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
17 an	6 - Pelatihan Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Penanaman Modal Tingkat Dasar dan Lanjutan	06	230	Orang		Kementerian Investasi dan Penanaman Modal	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		03 - Transformasi Tata Kelola		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		09 - Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		-	-	-	-				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemerintah Daerah A - Kami berharap utk kegiatan ini secara offline - Menerima untuk dicover dengan APBD		Kementerian Investasi (BKPM) - RO nya keliru, pengembangan sistem usaha, yang merupakan bagian dari pusdiklat - Kami confirm dengan catatan. - Pendanaan akomodasi dan transportasi ditanggung oleh daerah - Kuota akan dibahas lebih lanjut - Pola pembiayaan: Dari Provinsi bisa mengajukan permohonan kerjasama dengan kami		Direktorat PIKEI - Disepakati			



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

			<ul style="list-style-type: none">- Sebenarnya sudah ada pelatihan sudah ada 12 angkatan online- Kalau secara online, bisa dibiayai oleh APBN kalau offline dengan APBD		
--	--	--	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
18	4 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	04	34	Kegiatan		Kementerian Pertanian	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Sekretaris Dinas Penanaman Pangan - Hampir 80% petani kami masih pada kelas pemula, kami ingin meningkatkan transmuda menjadi transmadya		Kementerian X - Bahwa kita sarankan untuk diusulkan DAK Non Fisik, karena di APBN itu tidak ada. Di DAK Non Fisik utk provinsi, penggunaanya adalah peningkatan kapasitas.		Direktorat PP - Kami sebelumnya mengusulkan dibiayai oleh DAK Non Fisik (yang masih dalam proses perundingan) - Kita perlu mendengar terlebih dahulu dari yang lain bagaimana Pimsid: - Ditolak dan diusulkan kembali melalui DAK Non Fisik untuk menu pelatihan petani - Agar Kementan, Dit. PP, Reg2 utk tetap mengawal koordinasi dan provinsi			



NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
19	3 - Klaster Tambak Udang Intensif	03	2	Lokasi		Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		-	-	-	-				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemerintah Daerah A - Berlokasi di Kabupaten Bombana, Kecamatan Larowatu Utara, Desa Wak - Kami berharap 2 Kabupaten ini bisa diprogramkan		Kementerian Perikanan -		Direktorat KKP - Di Renja belum ada, untuk usulan ini sepertinya ditolak. - Sejalan dengan yang disampaikan sebelumnya, di tahun 2025 tidak masuk ke dalam renja kami pak. - Sebelumnya tahun 2023 sultra sudah mendapatkan bantuan di kabupaten muda			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
20	01 - Pembangunan Bandar Udara Kolaka Utara	01	1	Unit		Kementerian Perhubungan	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Porsen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		-	-	-		-			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemerintah Daerah A - Disepakati		Kementerian Perhubungan DJPU - RC sudah ada tapi perlu direvisi pada pembiayaannya menjadi APBN - Mohon klarifikasi sejauh mana penyelesaian poin-poin tsb - Masalah hukum terkait APBD (pembangunan talud dengan menggunakan APBD) dan pembangunan lainnya menggunakan APBN - Utk masterplan lainnya menggunakan APBN		Direktorat Transportasi - Kesiapan dan RC masih belum ada, Pimsid - Ditolak. RC diperbaiki, yang tanda tangan perlu tanda-tangan lagi.			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

			Bappeda Sultra - Kewajiban pemerintah daerah		
--	--	--	---	--	--

3. REKAPITULASI

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Direkomendasikan	8
Tidak Direkomendasikan	12
Tidak Terbahas	0